

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena. Makassar.
- , 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Dendy Sugono, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Refika. Bandung.
- Fithriatus Shalihah. 2017. *Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Pena Grafika. Jakarta.
- Hendrastanti Yudowidagdo, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus. 1987. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Reflika Aditama. Bandung.
- Poerwodarmita. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Septiana Erike Gobuino. 2014. *Praktik Perjudian (Studi Kasus "Judi Kupon Togel" di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara)*. Satya Wacana University Press. Salatiga.

- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Djambatan. Jakarta.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Idea Publishing. Gorontalo.

JURNAL

- Dody Tri Purnawinata. 2021. "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online". Solusi, Vol. 19, No. 2.
- Geraldly Waney. 2016. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP)". Lex Crimen. Vol. V. No. 3.
- Mesias J.P. Sagala. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)". Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18 No. 3.

INTERNET/WEBSITE

- CNN Indonesia, "Polisi Selidiki Tarung Bebas di Makassar, Diduga Terorganisir", Cnnindonesia.com, Agustus 2021
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210804123314-12-676239/polisi-selidiki-tarung-bebas-di-makassar-diduga-terorganisir>
- Dewi Anggara Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Melalui Lembaga Adat*
www.repository.unmuha.ac.id, diakses 25 September 2021.
- Fauzan, "Heboh 'Makassar Street Fight', Penonton Taruhan saat 2 Pemuda Bertarung Sampai Menyerah", Liputan6.com 2021.
<https://www.liputan6.com/regional/read/4623079/heboh-makassar-street-fight-penonton-taruhan-saat-2-pemuda-bertarung-sampai-menyerah>

Indozone, “Viral Tarung Bebas Ilegal di Makassar ala ‘street fighter’, Polisi Turun Tangan”, Indozone.id, Agustus 2021.

<https://www.indozone.id/news/L9s8bL7/viral-tarung-bebas-ilegal-di-makassar-ala-street-fighter-polisi-turun-tangan/read-all>

Muslimin Emba, “Amankan 8 Orang, Polisi Buru Panitia Makassar Street Fighter”, TribunMakassar.com, Agustus 2021

<https://makassar.tribunnews.com/2021/08/04/amankan-8-orang-polisi-buru-panitia-makassar-street-fighter>

Reza Gunadha dan Aulisa Hafisa, “Viral Ajang Street Fight Makassar, Petarung Berkelahi Sampai KO”, Suara.com, Agustus 2021

<https://www.suara.com/news/2021/08/03/100203/viral-ajang-street-fight-makassar-petarung-berkelahi-sampai-ko?page=all>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.